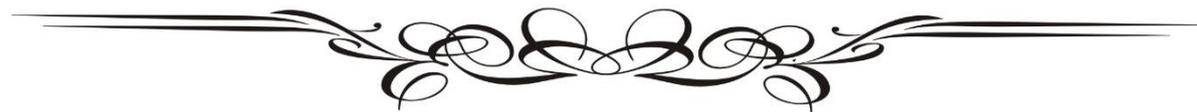


KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Kamis , 8 November 2018



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Media Indonesia (Halaman, 16)	Kamis, 8 November 2018	Badan Pengawas Air Tanah Perlu Dibentuk	Sistem pengelolaan sumber daya air perlu dibenahi. Penggunaan air permukaan harus dioptimalkan, sedangkan air tanah idealnya untuk cadangan.
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 8 November 2018	Eskalasi Proyek Belum Perlu	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan belum ada rencana dari pemerintah untuk melakukan eskalasi proyek yang dikerjakan di Kementerianya imbas dari fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
3	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)	Kamis, 8 November 2018	Berita Foto	Pembangunan Ruas Tol Semarang - Batang
4	Kompas (Halaman, 7)	Kamis, 8 November 2018	Suramadu dan Kemiskinan Madura	Setelah sekitar Sembilan tahun berstatus sebagai jalan tol, pemerintah akhirnya memutuskan jembatan Suramadu menjadi jalan umum.
5	Kompas (Halaman, 17)	Kamis, 8 November 2018	Rumah untuk Aparatur Negara Disiapkan	Pemerintah sedang menyiapkan program penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara, tentara, dan polisi. Program ini ditargetkan bisa berjalan secara bertahap mulai tahun depan.
6	Kompas (Halaman, 17)	Kamis, 8 November 2018	Wamena-Mbua Rawan Kecelakaan	Jalan Trans – Papua ruas Wamena – Mbua yang dibuka sejak 2016 kurang aman dilintasi pengendara. Kondisi jalan sepanjang 90 kilometer tersebut banyak yang berlubang.

Judul	Badan Pengawas Air Tanah Perlu Dibentuk	Tanggal	Kamis, 8 November 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 16)		
Resume	Sistem pengelolaan sumber daya air perlu dibenahi. Penggunaan air permukaan harus dioptimalkan, sedangkan air tanah idealnya untuk cadangan.		

Badan Pengawas Air Tanah Perlu Dibentuk

Sistem pengelolaan sumber daya air perlu dibenahi. Penggunaan air permukaan harus dioptimalkan, sedangkan air tanah idealnya untuk cadangan.

PUTRI ANISA YULIANI
putri@mediaindonesia.com

PENGAWASAN terhadap penggunaan air tanah didorong untuk menjadi pokok bahasan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air (SDA). Selain itu, hal penting lainnya yang perlu dicakup dalam RUU itu ialah pembentukan sistem pengelolaan air yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan.

"Saat ini Indonesia belum memiliki badan pengawas air tanah. Padahal, pengawasan mutlak diperlukan untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah di Indonesia," ujar Kepala Bidang Air Tanah Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wahyudin, dalam Pertemuan Ilmiah Ahli Air Tanah Indonesia di Jakarta, kemarin.

Ia mencontohkan apa yang terjadi di DKI Jakarta yang hanya memiliki sedikit petugas

pengawas pengelolaan air. Padahal, ada belasan ribu titik sumur serta pipa saluran air yang harus diawasi.

"Belum lagi keberadaan sumur-sumur liar. Badan pengawas ini penting karena akan memayungi pengawasan pengelolaan air secara nasional," kata Wahyudin.

Kementerian ESDM, lanjutnya, juga berharap RUU itu dapat mengakomodasi terbentuknya sistem pengelolaan air yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan. Saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengandalkan air tanah untuk berbagai keperluan. Padahal, idealnya air tanah menjadi cadangan. Air permukaan seperti air sungai dan danau seharusnya menjadi andalan.

"Pembangunan sistem pengelolaan air permukaan, termasuk distribusinya ke masyarakat belum maksimal," tambah Wahyudin.

Karena itu, lanjut Wahyudin, Kementerian ESDM, terus mendorong percepatan pembahasan RUU SDA. Saat ini Indonesia berpegang pada UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan setelah UU No 7 Tahun 2004 tentang SDA dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2015 silam.

"RUU ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena meski kita bisa berpegang pada UU 11/1974, UU tersebut adalah UU lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian," tegas Wahyudin.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Dewan Penasihat Himpunan Ahli Air Tanah

Indonesia Lambong Hutasoit. Menurutnya, masalah sumber daya air tidak boleh dibiarkan berlama-lama tanpa payung hukum induk.

"Air itu masalah yang sangat penting. Saat ini air di Indonesia menjadi masalah yang pelik. Tidak hanya banyak yang kekurangan, tetapi yang punya potensi air pun belum tentu bisa mengelolanya secara maksimal," ujarnya.

Penurunan muka tanah

Pada kesempatan sama, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Ricky Marojahan Mulia mengungkapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang berjuang mengendalikan penurunan muka tanah melalui pengelolaan air tanah. Data 2017 menyebut penurunan muka tanah telah mencapai 25 cm dalam tiga tahun.

Menurut dia, masifnya pengambilan air tanah menjadi salah satu penyebabnya, selain beban dari banyaknya gedung-gedung tinggi, serta perumahan dan penduduk di wilayah DKI (H-2)

Judul	Eskalasi Proyek Belum Perlu	Tanggal	Kamis, 8 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan belum ada rencana dari pemerintah untuk melakukan eskalasi proyek yang dikerjakan di Kementerianya imbas dari fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.		

Eskalasi Proyek Belum Perlu

JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan belum ada rencana dari pemerintah untuk melakukan eskalasi proyek yang dikerjakan di kementeriannya imbas dari fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Basuki mengatakan bahwa mengacu pada aturan yang ada, Kementerian Keuangan harus menetapkan kondisi kahar terhadap suatu kondisi ekonomi sebelum keputusan melakukan eskalasi atau penyesuaian harga kontrak diambil.

Sampai saat ini, dia mengatakan belum ada keputusan dari Kemenkeu untuk dilakukannya eskalasi.

"Kami mengikuti aturan yang ada. Bila Kemenkeu memutuskan situasi tergolong kahar, pasti harus ada eskalasinya. Tetapi kalau tidak diputuskan oleh Kemenkeu, tidak ada eskalasi," kata Basuki kepada *Bisnis*, Rabu (7/11).

Sebagai informasi, sepanjang 2018 Kementerian PUPR mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp111,06 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp87,14 triliun

merupakan paket kontraktual 1 tahun, paket kontraktual tahun jamak baru dan lanjutan yang setara dengan 10.039 paket.

Sebelumnya, sejumlah kontraktor mulai menyisir proyek-proyek *multiyears* yang dinilai perlu dilakukan eskalasi atau penyesuaian harga kontrak imbas dari pelemahan rupiah yang nilai tukarnya telah melewati Rp15.000 per dolar Amerika Serikat.

Direktur Utama Waskita Toll Road (WTR) Herwidiakto mengatakan sempat perkasanya dolar AS terhadap rupiah belakangan ini, kontraktor mulai merasakan adanya perubahan pada biaya pembangunan.

"Mulai terasa klaim eskalasi yang berubah. Eskalasi konstruksi naik, biaya investasi akan naik *kan*," kata Herwidiakto kepada *Bisnis*, belum lama ini.

Herwidiakto mengatakan pihaknya tengah memetakan proyek-proyek yang paling terdampak dan sebagian besar akan selesai pembangunannya.

Sebelumnya, saat pelemahan rupiah baru menyentuh kisaran Rp13.700, Herwidiakto mengatakan eskalasi kontrak

belum terlalu terasa karena sebagian besar material proyek dipasok dari lokal. Seiring dengan semakin melemahnya rupiah terhadap dolar, perubahan pada sisi biaya konstruksi mulai terasa.

Dengan terdepresiasinya rupiah, proyek dengan komponen impor yang tinggi memang berpotensi akan mengalami lonjakan kenaikan biaya.

Pada proyek *multiyears*, perhitungan ulang nilai proyek di akhir tahun memang rutin dilakukan. Biasanya, eskalasi yang diajukan berkaitan dengan kenaikan inflasi yang berpengaruh terhadap sejumlah komponen pada pembangunan proyek.

Direktur Operasi I PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Budi Saddewa Soediro mengatakan kendati sebagian besar material proyek yang dikerjakan dibawah direktoratnya dipasok dari lokal, pihaknya sudah merasakan dampak dari pelemahan rupiah, tetapi tidak signifikan.

Direktorat yang ditangani Budi spesifik untuk proyek-proyek ADHI di bidang jalan tol, bundungan dan sistem

penyediaan air minum (SPAM).

"Ada ya, tapi porsi di kami tidak terlalu banyak untuk material impornya. Tidak signifikan untuk di direktorat saya," ujarnya.

Saat ini, Budi mengatakan pihaknya tengah mengkaji proyek-proyek yang dinilai perlu melakukan eskalasi kontrak imbas pelemahan rupiah.

"Sedang kami kaji karena tidak semua proyek kondisinya sama," ujarnya.

Direktur Wilayah Timur PT Hutama Karya (Persero) Sugeng Rochadi mengatakan eskalasi setiap kontrak proyek relatif sudah ada rumusan, tetapi hal itu di luar hal khusus seperti depresiasi rupiah.

"Untuk proyek *multiyears* bulan ke 13 ada eskalasinya, sehingga sudah terukur kompensasinya. Untuk hal khusus, menunggu kebijakan pemerintah," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Budi Harto menjelaskan pelemahan rupiah yang berpengaruh pada harga satuan pekerjaan akan terlihat pada perubahan indeks harga untuk menetapkan eskalasi. *(Irene Agustine)*

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 8 November 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)		
Resume	Pembangunan Ruas Tol Semarang - Batang		

► PEMBANGUNAN RUAS TOL SEMARANG-BATANG



Foto aerial Jembatan Kali Kuto yang telah selesai dibangun di ruas Tol Semarang-Batang, Sambungsari, Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Rabu (7/11). Pembangunan jalan tol dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp11,05 triliun tersebut merupakan proyek pertama dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diberikan penjaminan pemerintah oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang rencananya akan Commercial Operations Date (COD) pada Desember 2018.

Bisnis/Nurul Hidayat

Judul	Suramadu dan Kemiskinan Madura	Tanggal	Kamis, 8 November 2018
Media	Kompas (Halaman, 7)		
Resume	Setelah sekitar Sembilan tahun berstatus sebagai jalan tol, pemerintah akhirnya memutuskan jembatan Suramadu menjadi jalan umum.		

Suramadu dan Kemiskinan Madura

Khoirul Rosyadi

Pengajar Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunjoyo, Madura

Setelah sekitar sembilan tahun berstatus sebagai jalan tol, pemerintah akhirnya memutuskan Jembatan Suramadu menjadi jalan umum.

Itu artinya, semua kendaraan yang melewati jembatan yang menghubungkan Surabaya dengan Bangkalan (Madura) itu tidak lagi dikenai tarif. Keputusan ini diambil, salah satunya, agar kehadiran Jembatan Suramadu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Madura.

Seperti dikatakan Presiden Joko Widodo, kehadiran Jembatan Suramadu selama ini kurang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Madura. Hal ini tecermin dari masih besarnya angka kemiskinan di empat kabupaten di Madura; Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, yakni 16-23 persen. Bahkan, empat kabupaten tersebut dianggap sebagai penyumbang terbesar kemiskinan yang ada di Jawa Timur.

Pertanyaan pentingnya adalah bisakah perubahan status Jembatan Suramadu dari jalan tol menjadi jalan umum menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Madura? Mampukah Suramadu menjadi "Jembatan Harapan" bagi masyarakat Madura?

Dua wajah kemiskinan

Oscar Lewis (dalam Parsudi Suparlan, 1995) meyakini, kemiskinan dan keterbelakangan lahir karena penderitaan ekonomi yang berlangsung lama. Sementara kebudayaan kemiskinan dan keterbelakangan lahir dalam masyarakat yang memiliki karakter: 1) sistem perekonomian terlalu berorientasi pada keuntungan; 2) tingginya tingkat/angka pengangguran dan setengah dari pengangguran tersebut adalah tenaga

terampil; 3) rendahnya upah atau gaji yang diperoleh pekerja; 4) tidak berhasilnya orang yang berpenghasilan rendah meningkatkan organisasi sosial, ekonomi, dan politik secara sukarela; 5) sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral; serta 6) kuatnya nilai-nilai pada kelas berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal atau kesempatan untuk terus meningkat dalam status sosial.

Meski penjelasan Lewis bukanlah jawaban terakhir dari sebuah perdebatan panjang tentang kemiskinan, Lewis menyadarkan kita bahwa kemiskinan sesungguhnya lahir dari persoalan kultural dan struktural yang ada dalam masyarakat. Persoalan ini pula yang terjadi pada masyarakat Madura sesungguhnya yang berakar pada permasalahan kultural sekaligus struktural.

Budaya patron-klien, patriarki, dan budaya menikah dini adalah hal-hal kontributif dalam perspektif kebudayaan tentang keterbelakangan yang terjadi di Madura. Namun, dengan melihat etos masyarakat Madura—kebutuhan untuk maju, semangat untuk menuju hidup yang lebih baik—adalah hal-hal yang meyakinkan kita bahwa keterbelakangan yang diderita masyarakat Madura bukan masalah kultural semata.

Dengan demikian, selain faktor kultural, ada faktor struktural yang menjadikan adanya kemiskinan dan keterbelakangan di Madura. Perilaku elite pemerintah yang nepotis, koruptif, ketidakmerataan kesempatan, kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat, dan pendidikan yang belum merata merupakan hal-hal yang bisa menjelaskan ketidakadilan struktural yang terjadi di Madura selama ini.

Untuk keluar dari wajah kemiskinan masyarakat, Amartya Sen (2013) pernah menawarkan jalan dialog kebudayaan. Guru besar filsafat dan ekonomi di Universitas Harvard, AS, tersebut percaya bahwa dialog kebudayaan mampu memecahkan beragam persoalan yang dihadapi masyarakat (du-



nia), baik di bidang ekonomi (kemiskinan), politik, konflik, maupun bidang strategis lain.

Selain itu, menurut peraih Hadiah Nobel Bidang Ilmu Ekonomi tahun 1998 tersebut, kebudayaan juga bisa menjadi kekuatan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu, mengesampingkan budaya dan kebudayaan dalam pembangunan (ekonomi) sesungguhnya menggerus potensi kesejahteraan yang dijanjikan ekonomi itu sendiri.

Pemahaman tersebut membawa kita pada satu tesis bahwa kebudayaan sebenarnya merupakan pandangan nilai, pikir, agama, pandangan, sikap, teknologi, mata kehidupan, rasa, batin, dan jiwa masyarakat yang di dalamnya ada beragam potensi (ekonomi) yang mampu menggerakkan peradaban manusia. Karena itu, berbicara tentang kebudayaan dalam pusran ekonomi, meminjam penjelasan Donny Gahril Adian, kebudayaan sesungguhnya sebaht monolog yang bagi kebanyakan orang merupakan sesuatu yang tidak perlu diperbincangkan, melainkan dilakoni. Sebab, kebudayaan sesungguhnya orkestra kolektif menuju "tanah perjanjian" bernama peradaban.

Jika kebudayaan adalah pilihan untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan, yang kita butuhkan adalah strategi kebudayaan yang tepat bagi masyarakat Madura. Keberanian untuk membuka diri tanpa harus menghilangkan kecerdasan lokal yang ada dalam masyarakat Madura merupakan strategi kebudayaan yang tepat. Tanpa keberanian membuka diri untuk berdialog dengan "dunia di sana", Madura akan ditinggalkan oleh zaman.

Tentu ketakutan kehilangan kearifan lokal dan hancurnya ketotentikan masyarakat Madura adalah hal lumrah dalam proses dialog kebudayaan. Namun, kisah sukses Jepang, Korea (Selatan), dan China, yang berani membuka diri tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai lokal, adalah cerita yang semestinya menjadi ilham bagi masyarakat Madura.

Keberanian membuka diri untuk berdialog dengan budaya di luar Madura tentu membutuhkan *political will* (niat baik) dari pemerintah setempat. Niat baik pemerintah ini bukan saja ditunjukkan dalam bentuk kebijakan yang memberi ruang dan berpihak kepada masyarakat Madura, melainkan juga keberanian untuk transparan, tidak koruptif, manipulatif, dan nepotisme. Hal ini kunci dari strategi kebudayaan agar Madura bisa keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Perubahan status itu

Dengan menggunakan pendekatan lanskap pemikiran tersebut, perubahan status Jembatan Suramadu dari jalan tol menjadi jalan umum sesungguhnya bagian ikhtiar pemerintah dalam menyusun strategi kebudayaan untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan di Madura. Tentu keberanian pemerintah itu mestinya ditopang keberanian masyarakat Madura untuk berdialog dengan kebudayaan dan nilai-nilai yang berkembang di luar mereka. Pendidikan modern, kesetaraan, keterbukaan, dan egalitarian adalah nilai-nilai yang seharusnya dihadirkan dalam kehidupan masyarakat Madura masa kini, tanpa harus menghilangkan kecerdasan lokal yang mereka miliki.

Selain itu, keberanian pemerintah lokal untuk bisa transparan dalam mengelola birokrasi pemerintahan, tidak koruptif, manipulatif, dan nepotisme adalah hal utama dalam penerapan strategi kebudayaan dalam pengentasan rakyat dari kemiskinan di Madura. Tanpa itu semua, perubahan status Jembatan Suramadu dari jalan tol menjadi jalan umum tidak bermakna apa-apa.

Judul	Rumah untuk Aparatur Negara Disiapkan	Tanggal	Kamis, 8 November 2018
Media	Kompas (Halaman, 17)		
Resume	Pemerintah sedang menyiapkan program penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara, tentara, dan polisi. Program ini ditargetkan bisa berjalan secara bertahap mulai tahun depan.		

Rumah untuk Aparatur Negara Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sedang menyiapkan program penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara, tentara, dan polisi. Program ini ditargetkan bisa berjalan secara bertahap mulai tahun depan.

Pemerintah telah beberapa kali menggelar rapat terbatas untuk menyiapkan program penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara, tentara, dan polisi.

Pada Rabu (7/11/2018), Presiden Joko Widodo kembali memimpin rapat lanjutan. Rapat kemarin dihadiri, antara lain, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakil Kepala Polri Komisariss Jenderal

Ari Dono Sukmanto, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Hadir pula beberapa pemimpin bank milik negara.

"Saya kira kita sudah membicarakannya. Akan tetapi, saya minta masukan tentang pelaksanaan di lapangan seperti apa. Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang layak bagi 945.000 aparatur sipil negara, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri," kata Presiden pada pengantar rapat terbatas di Kantor Presiden.

Tujuan penyediaan rumah layak tersebut, lanjut Presiden, agar aparatur negara semakin konsentrasi dalam bekerja. Di samping itu, berbagai kegiatan dalam program itu akan memberikan efek ganda memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Menjawab pertanyaan wartawan seusai rapat, Bambang me-

nyatakan, 930.000 aparatur negara belum memiliki rumah pribadi. Angka ini mengacu pada data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mereka masih menyewa atau tinggal di rumah dinas. Untuk itu, percepatan penyediaan rumah bagi aparatur negara sangat dibutuhkan.

Terkait lahan pembangunan rumah, menurut Bambang, pemerintah akan menggunakan tanah milik negara. Untuk itu, Kementerian ATR dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bertugas mendata lahan yang berpotensi digunakan, terutama yang berlokasi di wilayah perkotaan atau kawasan suburban sepanjang memiliki jaringan transportasi publik memadai ke pusat kota.

Untuk konsep rumah, menurut Bambang, pemerintah akan fokus pada rumah susun hak milik. (LAS)

Judul	Wamena-Mbua Rawan Kecelakaan	Tanggal	Kamis, 8 November 2018
Media	Kompas (Halaman, 17)		
Resume	Jalan Trans – Papua ruas Wamena – Mbua yang dibuka sejak 2016 kurang aman dilintasi pengendara. Kondisi jalan sepanjang 90 kilometer tersebut banyak yang berlubang.		

Wamena–Mbua Rawan Kecelakaan

JAYAPURA, KOMPAS — Jalan Trans-Papua ruas Wamena-Mbua yang dibuka sejak 2016 kurang aman dilintasi pengendara. Kondisi jalan sepanjang 90 kilometer tersebut banyak yang berlubang. Selain itu, sejumlah titik yang melewati bibir jurang juga tidak dilengkapi pagar pengaman sehingga rawan kecelakaan.

Hal tersebut diungkapkan anggota Staf Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Desk Papua, Samuel Tabuni, di Jayapura, Rabu (7/11/2018). Kondisi itu ditemukan dari hasil monitoring tim Bappenas di ruas Wamena (Kabupaten Jayawijaya)-Mbua (Kabupaten Nduga), beberapa waktu lalu.

Padahal, menurut Samuel, jalan ini sangat penting untuk menghubungkan Kabupaten Jayawijaya dengan sejumlah distrik (setingkat kecamatan) di Kabupaten Nduga.

Ibu kota Jayawijaya, Wamena, adalah pusat redistribusi barang kebutuhan pokok bagi daerah-daerah di kawasan Pe-

gunungan Tengah Papua.

”Tidak adanya drainase menyebabkan air sering menggenangi badan jalan. Hal ini yang menyebabkan jalan yang dominan campuran pasir dan batu itu cepat berlubang,” kata Samuel.

Ia mengatakan, masyarakat setempat berharap pihak terkait segera memasang pagar pengaman di sejumlah titik jalan yang melewati tepian jurang di ruas tersebut. Jurang-jurang itu berkedalaman lebih dari 10 meter.

Selama ini ketiadaan pagar pengaman membuat warga yang melintas dengan mobil kerap terpaksa turun dan berjalan kaki karena ketakutan. ”Tahun lalu terjadi dua kecelakaan di ruas jalan itu. Korban tewas empat orang dan korban luka dua orang,” tuturnya.

Dibenahi bertahap

Menurut Samuel, ia telah menyampaikan masalah ini ke pimpinan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Papua. Namun, belum

ada respons dari pihak terkait.

Kepala BBPJN XVIII Papua Osman Marbun saat dikonfirmasi via telepon seluler, mengakui pihaknya belum memasang sejumlah fasilitas untuk menjamin keamanan pengguna jalan di ruas Wamena-Mbua.

”Kami akan membenahi jalan tersebut secara bertahap. Menurut rencana, setelah pemeriksaan kondisi jalan, kami akan berkoordinasi dengan dinas perhubungan setempat untuk melengkapi marka, rambu-rambu, dan perlengkapan lainnya,” ujar Osman.

Presiden Joko Widodo melalui program Nawacita mengeluarkan kebijakan untuk membangun Jalan Trans-Papua yang menghubungkan Jayawijaya, Nduga, dan Asmat sejak 2015. Total panjang jalan tersebut 284 kilometer.

Rute jalan itu adalah Wamena-Habema-Mbua-Mugi-Paro-Kenyam-Batas Batu hingga Mamugu di Asmat. Presiden telah meninjau ruas Wamena-Mbua dalam kunjungannya pada 10 Mei 2017. (FLO)